

Pengaruh Perekonomian Indonesia pada Era Orde Baru terhadap Indonesia di Era Digital

Balqis Syawkati Syahidah^{1*}, Marsella², Ulan Purnamasari³, Yuni Aulia⁴
¹⁻⁴Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, Indonesia
Email: balqis.44323022@mahasiswa.unikom.ac.id¹, marsella.44323023@mahasiswa.unikom.ac.id²,
ulan.44323024@mahasiswa.unikom.ac.id³, yuni.44323009@mahasiswa.unikom.ac.id⁴

Alamat: Jl. Dipati Ukur No. 112-116, Lebakgede, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, 40132, Indonesia

*Korespondensi penulis: balqis.44323022@mahasiswa.unikom.ac.id

Abstract. During the New Order government, Indonesia experienced a process of economic recovery after hyperinflation in the 1960s. A number of policies and programs during President Soeharto's leadership were actually successful in bringing Indonesia to a state of recovery, and they were even able to achieve various new achievements, which led to Indonesia being nicknamed the 'Asian Tiger'. However, as a result of the Asian Financial Crisis, Indonesia again fell into the abyss of an economic crisis (monetary crisis) in the 1990s. Finally, as a result of this incident, Indonesian reform occurred, marked by the fall of the authoritarian regime. From the ups and downs of the Indonesian economy during the New Order, this research reveals the influence of events and polemics that occurred at that time in relation to the current digital era. From what has been researched, it has been found that there are many positive influences, such as sustainability in managing the potential of economic resources better with the support of technology and also regarding the fact that there is a lack of digital infrastructure facilities which hinder the progress of economic productivity.

Keywords: New Order, Digitalization, Technology, Economic Crisis, National Development

Abstrak. Pada masa pemerintahan orde baru Indonesia mengalami proses pemulihan ekonomi pasca hiperinflasi di tahun 1960-an, sejumlah kebijakan dan program pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto nyatanya sukses membawa Indonesia pada kondisi pulih, bahkan mampu menapaki berbagai macam prestasi baru yang membawa Indonesia dijuluki sebagai 'Macan Asia'. Akan tetapi akibat daripada adanya Krisis Finansial Asia, Indonesia kembali jatuh dalam jurang krisis ekonomi (krisis moneter) pada tahun 1990an. Hingga pada akhirnya akibat dari peristiwa ini, terjadilah reformasi Indonesia dengan ditandai kejatuhan rezim otoriter. Dari peristiwa jatuh bangun ekonomi Indonesia di masa orde baru, penelitian ini mengungkap perihwal pengaruh peristiwa dan polemik yang terjadi pada masa itu dengan kaitannya terhadap era digital saat ini. Dari apa yang diteliti telah ditemukan bahwasanya ada banyak pengaruh positif seperti halnya keberlanjutan dalam mengelola potensi sumber daya ekonomi menjadi lebih baik dengan didukung teknologi dan juga perihwal fakta akan kekurangan fasilitas infrastruktur digital yang menghambat kemajuan produktivitas ekonomi.

Kata kunci: Orde Baru, Digitalisasi, Teknologi, Krisis Ekonomi, Pembangunan Nasional

1. LATAR BELAKANG

Keadaan perekonomian suatu negara dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi di negara itu sendiri. Pertumbuhan ekonomi dinilai berdasarkan indikator *Gross National Product* (GNP) yang berskala nasional dan *Gross Domestic Product* (GDP) yang dinilai antar wilayah (Suprayogi, 2023). Arah gerak daripada sebuah pertumbuhan tentu saja mengharapakan sebuah perkembangan yang lebih besar dan baik dari masa ke masa.

Hal ini menjadikan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu bentuk dinamis yang dapat berubah dari waktu ke waktu (Linda, 2022). Dalam memahami pertumbuhan ekonomi

seorang ahli Paul M. Romer menganalogikan pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah resep, kita tidak perlu memasak lebih banyak untuk mendapatkan sebuah hasil yang lebih daripada sebelumnya, memasak lebih banyak hanya akan membuat kita menghadapi efek samping yang tidak diinginkan seperti halnya keterbatasan pasokan bahan. Maka daripada itu ketimbang memasak lebih banyak, alangkah lebih baik untuk meracik resep baru yang dapat menghasilkan masakan lebih baik (Priyono & Ismail, 2012). Dalam merancang sebuah pertumbuhan ekonomi adapun terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di antara lainnya ialah faktor politik, faktor sumber daya alam, faktor sumber daya manusia, faktor ilmu pengetahuan teknologi, faktor sosial budaya, faktor tenaga kerja dan faktor inflasi.

Meskipun sebuah perubahan mengindikasikan dinamisme akan tetapi sebuah perekonomian pada suatu negara perlu membentuk kebijakan atau sistem yang dapat memberikan kestabilan dan ketahanan ekonomi bagi negaranya. Tentu saja capaian akhir dari sistematisasi yang diberlakukan ialah demi mencapai pemenuhan hak dan kewajiban kesejahteraan bersama. Maka daripada itu penting bahwasanya bagi suatu negara untuk mengkaji dan memahami perkembangan perekonomiannya sendiri dari masa ke masa sebagai landasan acuan dalam merancang kebijakan dan guna meningkatkan laju perkembangan ekonomi ke arah yang lebih maksimal.

Tercatat pada laporan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia di Triwulan -II tahun 2024 bahwasanya Indonesia memiliki tingkat pertumbuhan sebesar 5,05% dari tahun ke tahun (*yoy*) salah satunya disebabkan oleh terkendalinya nilai inflasi pada angka 2,13% di bulan Juli. Angka tersebut dapat dicapai berkat kemampuan Indonesia dalam mengendalikan konflik geopolitik, disrupsi rantai pasok, dan perkembangan dari fluktuasi nilai tukar. Hal ini menjadikan posisi Indonesia pada urutan pertumbuhan ekonomi global dunia berada di atas China (4,7%), Singapura (2,9%), Korea Selatan (2,3%), dan Meksiko (2,24%) pada tahun 2024 Triwulan kedua ini (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).

Hal ini tentu menjadi awal yang baik bagi situasi Indonesia yang berada pada masa peralihan kepemimpinan dari era Presiden Joko Widodo kepada Presiden Prabowo. Dengan nilai pertumbuhan ekonomi yang dinilai cukup stabil dan meningkat buah dari era kepemimpinan sebelumnya diharapkan dapat mendukung program pemerintahan di era yang baru. Berbicara tentang pengaruh era kepemimpinan terdahulu terhadap masa kepemimpinan yang mendatang, Indonesia memiliki sejarah perekonomian yang variatif pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Sepak terjang Soeharto sebagai presiden tidak bisa dianggap remeh, ia telah mampu membangkitkan perekonomian Indonesia lewat

mengimplementasikan konsep perekonomian Pancasila yang berfokus terhadap pembangunan ekonomi nasional yang terpadu dan adil.

Sejak menjabat Presiden Soeharto sudah harus menghadapi situasi perekonomian Indonesia yang sedang berada dalam kondisi kritis imbas daripada hiperinflasi tahun 1963-1965, hiperinflasi tersebut merupakan keadaan dimana kala itu nilai rupiah mengalami inflasi sampai dengan 600%. Sedangkan penyebab daripada hiperinflasi itu sendiri dikarenakan pada masa orde lama, kepemimpinan Presiden Soekarno, Indonesia mencetak uang hanya untuk melunasi hutang dan menjalankan pembangunan proyek politik ketimbang pembangunan ekonomi. Puncaknya ialah penurunan harga ekspor karet dan tambang yang selama ini menjadi pemasukan ekspor terbesar kala itu. (Maulidina, Kurniawan, & Yasin, 2023). Hingga pada akhirnya imbas daripada tidak tepatnya pengelolaan dana tersebut orde lama mewariskan hutang sebesar Rp. 794 miliar atau 2,4 miliar dolar. (Adryamarthanino & Nailurfar, 2021).

Sebab karena kondisi itulah peran Soeharto sebagai presiden selanjutnya untuk dapat memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Salah satu langkah yang diambil oleh Presiden Soeharto kala itu ialah menghentikan operasi Dwikora, kembali bergabung bersama PBB, serta mengubah haluan negara yang semula menolak bantuan asing menjadi terbuka terhadap berbagai kerja sama dengan pihak asing. Dari program yang ia rancang baik secara jangka panjang dan jangka pendek nyatanya berhasil memulihkan perekonomian negara bahkan hingga membawanya di puncak swasembada pangan. Namun pada masa jabatannya pula Indonesia mengalami krisis moneter dengan nilai tukar rupiah-dolar yang jatuh sehingga menjadikan harga pangan melonjak drastis.

Dari peristiwa tersebut maka kami berasumsi bahwasanya dalam meningkatkan kualitas sebuah negara penting untuk memperhartikan jalannya perekonomian dari negara tersebut, melalui fokus mengkaji perkembangan ekonominya dari masa ke masa maka dapat mendukung tercipta sebuah tatanan perekonomian bangsa yang lebih baik. Adapun yang menjadi sebuah pertanyaan ialah bagaimana sebuah peristiwa masa lalu yang tidak terlalu terpengaruh akan teknologi seperti saat ini dapat berkontribusi dalam mendukung perekonomian saat ini di zaman serba digital. Tulisan ini akan memuat pembahasan mengenai berbagai siasat yang dilakukan pemerintah orde baru untuk mencapai kesejahteraan pangan sebagai salah satu roda kemajuan ekonomi, tantangan yang dihadapi oleh pemerintahan Indonesia untuk kembali memulihkan keadaan perekonomian pasca dilanda krisis moneter dan adapun yang menjadi inti ialah menelisik seberapa berpengaruh dinamika ekonomi pada masa orde baru terhadap era digital.

2. KAJIAN TEORITIS

Sistem Ekonomi Indonesia merupakan sebuah sistem yang tidak akan ada hentinya untuk dikaji dan dibahas, sistem ekonomi itu sendiri memiliki makna yang disampaikan oleh Gilarso (1992: 486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para produse, konsumen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari. Sedangkan Indonesia sendiri menerapkan Sistem Ekonomi Pancasila sebagai sebuah konsep sistem ekonomi yang dianut Indonesia dikarenakan berdasarkan ideologinya.

Secara khusus Hamid (2005) menjelaskan bahwasanya terdapat lima prinsip penerapan Sistem Ekonomi Pancasila, yaitu: (1) Roda kegiatan ekonomi bangsa digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. (2) Ada kehendak kuat warga masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial, yaitu tidak membiarkan terjadinya dan berkembangnya ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. (3). Semangat nasionalisme ekonomi; dalam era globalisasi makin jelas adanya urgensi terwujudnya perekonomian nasional yang kuat, tangguh, dan mandiri. (4) Demokrasi ekonomi berdasar kerakyatan dan kekeluargaan: koperasi dan usaha-usaha kooperatif menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat. (5). Keseimbangan yang harmonis, efisien, dan adil antara perencanaan nasional dengan desentralisasi ekonomi dan otonomi yang luas, bebas, dan bertanggung jawab, menuju perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan memahami dan mengenali sistem ekonomi di Indonesia maka akan membuka jalan untuk menelusuri pembahasan mengenai perkembangan ekonomi. Perkembangan Ekonomi di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Undang – Undang Dasar 1945 yang dikandung dalam Bab XIV Pasal 33 yang terdiri dari tiga ayat, yakni : (1). Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. (2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. (3). Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan mengacu pada ayat-ayat tersebut maka sudah jelas apa saja yang dapat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Hal ini telah dirancang dan diatur sedemikian rupa sebagai usaha guna menjalankan perekonomian. Digitalisasi Ekonomi ialah tolak ukur akhir yang ingin kami analisis dan teliti, pada saat ini ranah digital adalah sebuah konsumsi dan aktivitas harian semua orang. Tidak hanya secara individu akan tetapi juga dalam menjalankan roda kelompok, tidak terkecuali bagi sektor ekonomi yang memiliki daya

saing tinggi untuk dapat bertahan secara global. Menurut Bukht and Heeks (2017), digitalisasi berkaitan dengan penyediaan infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) yang menjadi sarana kegiatan ekonomi maupun proses bisnis. Indikator digitalisasi dapat diukur dengan kualitas infrastruktur dan kemampuan pelaku ekonomi dalam memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK).

Terdapat empat pemikiran yang mengaitkan antara teknologi/ digitalisasi dengan pertumbuhan ekonomi menurut Pradhan, Arvin, Nair, Bennett, & Bahmani, (2019). , yaitu : (1) *Supply-Leading Hypothesis* (SLH), yang menunjukkan bahwa investasi TIK mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, dan efisiensi; (2) *Demand-Following Hypothesis* (DFH), yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi menyebabkan pembangunan TIK. Alasannya adalah ketika pendapatan masyarakat meningkat, pemerintah dapat memungut pajak dan membangun infrastruktur telekomunikasi agar masyarakat dapat mengakses internet dengan mudah; (3) *Feedback Loop Hypothesis* (FLH), yang berpendapat bahwa terdapat hubungan yang kompleks antara investasi infrastruktur TIK dan pertumbuhan ekonomi, dan (4) *Neutrality Hypothesis* (NH), berargumen bahwa tidak ada hubungan kausalitas antara investasi infrastruktur TIK dan pertumbuhan ekonomi.

Dalam merangkai penelitian ini kami mendapatkan sejumlah pembahasan dan teori yang selaras dengan beberapa jurnal atau karya ilmiah terdahulu yaitu :

- a. Jurnal karya Sumarsono, Dicky dengan judul “Sistem Perekonomian Negara - Negara Di Dunia.” Dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AAS Surakarta (2016) yang mengutip mengenai sistem perekonomian.
- b. Jurnal karya Zulfikar, Ahmad Arif ; Sari, Niken Junika dengan judul “Analisis Perkembangan Ekonomi Indonesia : Perspektif Hukum Ekonomi Islam.” Dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (2024) yang mengutip mengenai perkembangan ekonomi.
- c. Jurnal karya Abdillah, Khubbi yang berjudul “Pengaruh Digitalisasi dan Variabel Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Asia.” Dari Universitas Wijaya Putra (2023) yang mengutip mengenai digitalisasi ekonomi.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui analisis data deskriptif dan interpretatif. Penulisan ini mengandalkan kajian literatur dari berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, dan artikel yang relevan. Semua referensi yang digunakan dipastikan memiliki kredibilitas tinggi dan sesuai dengan konteks penelitian, sehingga dapat mendukung kualitas analisis yang dilakukan. Selain kajian literatur, data kuantitatif yang diambil dari hasil survei juga digunakan jika diperlukan untuk memperkuat argumen penelitian. Data survei ini diambil dari lembaga atau situs terpercaya yang memiliki metode pengumpulan data yang valid dan sesuai dengan standar ilmiah.

Validasi dilakukan dengan triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan berbagai referensi untuk memastikan akurasi dan konsistensi data. Pendekatan ini juga melibatkan analisis kritis terhadap sumber-sumber yang digunakan, sehingga landasan teori dan argumen yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di bidang yang relevan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada masa orde baru dimulai keadaan perekonomian Indonesia ditinggalkan oleh Soekarno dalam keadaan yang tidak bisa dikatakan baik hal ini merupakan imbas daripada hiperinflasi dan hutang yang menggunung. Dalam keadaan seperti itulah Soeharto sebagai presiden yang melanjutkan posisi kepemimpinan Indonesia menghadapi tantangan yang cukup berat dalam memulihkan kembali perekonomian Indonesia. Sejumlah usaha dilakukan lewat perancangan dan penyelenggaraan kebijakan serta program untuk mendukung pemulihan.

Dengan mengusung konsep ekonomi Pancasila yang berorientasi kepada pembangunan nasional terpadu dan berkeadilan serta melalui penerapan kebijakan-kebijakan berorientasi memperkuat pembangunan industri dan pertanian sehingga dalam sektor manufaktur, produksi pangan dan komoditas pertanian menjadi tombak pembangunan ekonomi negara kala itu.

Selain daripada itu peningkatan investor asing dan menjamin keamanan investasi juga menjadi salah satu solusi guna mendorong rehabilitasi ekonomi (Inanna & Nurjannah, 2023). Hal tersebut merupakan sesuatu yang disebut sebagai program, jangka pendek yang bertujuan

menekan nilai inflasi pada tahun 1966 dengan cara menyeimbangkan anggaran belanja negara dan memperbanyak pinjaman luar negeri. Lalu usai merasa bahwasanya program jangka pendek tersebut dapat terlaksana dengan baik dan sukses memulihkan kembali perekonomian Indonesia, pemerintahan orde baru mulai melancarkan program jangka panjang. Nama program tersebut diberi ialah Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), rencana pembangunan dengan rentan lima tahun ini nyata dilangsungkan selama lima periode kepemimpinan Presiden Soeharto, adapun runtutan rekapitulasi mengenai Repelita ialah sebagai berikut :

- a. Repelita I (1969-1973) berfokus pada rehabilitas dan pembangunan.
- b. Repelita II (1974-1979) dan Repelita III (1979-1984) berfokus pada pertumbuhan ekonomi, stabilitas, serta pemerataan pembangunan yang mengandalkan sektor pertanian dan industri dalam pengolahan bahan baku mentah.
- c. Repelita IV (1984-1989) dan Repelita V (1989-1994) berfokus mempertahankan pencapaian dengan turut bergerak dalam sektor industri, dengan fokus khusus untuk menghasilkan bahan ekspor, penyerapan tenaga kerja, pengolahan pertanian dan manufaktur.

Dalam menjalankan program-program tersebut, pemerintah orde baru memiliki kebijakan ekonomi yang tertera pada Trilogi Pembangunan dan 8 Jalur Pemerataan Ekonomi, kedua hal tersebut berbunyi :

- a. Trilogi Pembangunan:
 1. Stabilitas nasional yang dinamis
 2. Pertumbuhan ekonomi tinggi
 3. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- b. 8 Jalur Pemerataan Ekonomi:
 1. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan).
 2. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan.
 3. Pemerataan pembagian pendapatan.
 4. Pemerataan kesempatan kerja.
 5. Pemerataan kesempatan berusaha.
 6. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan wanita.
 7. Pemerataan penyebaran pembangunan.
 8. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan.

Dalam menjalankannya Presiden Soeharto dibantu oleh sejumlah teknokrat ekonomi yang melakukan pelatihan khusus di Amerika Serikat. Seperti yang sudah disampaikan bahwasanya pada masa orde baru pemerintah mengubah haluan perekonomian menjadi berdasarkan Pancasila yang berfokus pada pembangunan nasional dan pengembangan industri, serta pertanian. Dalam hal pembangunan, orde baru sukses memperkenalkan pembangunan infrastruktur dengan skala besar.

Pembangunan infrastruktur memang sangat penting bagi sebuah negara yang memiliki orientasi kebijakan ekonomi industrialisasi, pada masa orde baru sejumlah pembangunan yang dilakukan ialah pembangunan jalan tol, pembangunan jaringan listrik dan telekomunikasi, pembangunan bandara dan pelabuhan, serta proyek PLTA

Pembangunan tersebut berhasil mendukung meningkatkan mobilisasi perdagangan dan konektivitas antar wilayah sehingga memudahkan hilirisasi pertumbuhan industri dan perdagangan. Lewat pembangunan ini pula sejumlah daerah mendapatkan akses pasar baru untuk menjual produk-produknya, menjadikan suatu daerah dapat mengembangkan daerahnya lewat sektor perdagangan sehingga meningkatkan daya saing antar daerah. Sebab karena ini pula banyak investor asing yang tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia karena dengan dibukanya jalur kerja sama serta pembuktian tata kelola yang berkembang menjadikan Indonesia sebagai daerah penanaman investasi yang potensial.

Dalam perkembangan industri, sektor yang banyak berkembang saat itu meliputi industri tekstil, elektronik, dan baja. Dalam mendukung perkembangannya maka dibuatlah kebijakan pengamanan nasional, perlindungan pasar dalam negeri dan pengendalian impor.

Hal ini diikuti dengan pemulihan mekanisme pasar bebas dengan pembebasan kontrol pasar dengan berlandaskan pengimplementasian Undang - Undang Penanaman Modal Asing 1967 dan UU Penanaman Modal Dalam Negeri 1968, dari pengesahan undang-undang tersebut ternyata sukses membawa dampak pertumbuhan ekonomi lebih dari 10% di tahun 1968. Memasuki tahun 1970-1980an Indonesia sudah dapat mempertahankan kestabilan pertumbuhan ekonominya minimum di atas 5%,

Meskipun terdapat pencapaian yang signifikan akan tetapi masih banyak juga menuai kritik dan kontra terhadap kebijakan yang dilaksanakan, beberapa mengungkapkan bahwa dalam sejumlah kebijakan justru menyebabkan terhambatnya pertumbuhan industri dalam negeri dan rendahnya daya saing di pasar global. Terlebih mengenai komoditas ekspor bahan mentah seperti minyak mentah, gas alam dan kelapa sawit yang pada saat itu menjadi sumber pemasukan ekspor utama memiliki kerentanan terhadap fluktuasi harga global dan perubahan permintaan pasar. Selain daripada itu dengan banyaknya proyek pembangunan besar-besaran

yang dilaksanakan namun dominasi dipegang oleh perusahaan milik keluarga presiden serta elite politik menyebabkan kecurigaan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atau anggaran. Spekulasi tersebut dinaungi akibat daripada tidak transparannya serta ditambah hal ini juga menjadikan sektor swasta tumbuh dengan lambat.

Selain daripada isu korupsi dan nepotisme, megaproyek tersebut diikuti dengan isu lingkungan, beberapa pembangunan dinilai dilakukan tanpa memedulikan isu kerusakan lingkungan dan ekosistemnya. Bahkan sering kali menjadi isu hak asasi manusia dikarenakan pengeksploitasi masyarakat setempat. Akan tetapi perlu diakui bahwasanya pada masa pemerintahan orde baru telah banyak membuktikan bahwa sejumlah kebijakan dan program sukses membawa Indonesia pada pemulihan kondisi ekonomi pasca hiperinflasi. Sejumlah capaian luar biasa yang diraih Indonesia pada masa orde baru ialah:

- a. Perkembangan Ekspor, salah satu yang menjadi sumber peningkatan ekspor ialah adanya peristiwa Oil Boom 1973/1974 dan Oil Boom 1978/1979 akibat daripada adanya kenaikan harga minyak menjadi nilai pendapatan ekspor Indonesia meningkat tajam.
- b. Swasembada Beras, hal ini dicapai sebagai hasil daripada fokus pemerintah dalam meningkatkan sektor pertanian lewat program Repelita 1980, sebab karena adanya pencapaian ini juga Indonesia berhasil mengurangi angka kemiskinan pada saat itu.
- c. Revolusi Hijau, revolusi hijau merupakan salah satu program dari Repelita yang dimana dalam program ini memperkenalkan kepada petani mengenai cara kerja pengelolaan pertanian secara modern. Hasil dari program ini menjadikan sektor produksi pertanian Indonesia meningkat secara cukup signifikan.
- d. Kemajuan Transportasi, kemajuan transportasi terjadi karena terlaksananya program pembangunan nasional yang salah satu fokusnya ialah pada pembukaan berbagai akses jalur transportasi yang mempermudah mobilisasi serta pada masa orde baru terdapat sebuah bentuk kerja sama Indonesia dengan perusahaan Jepang yaitu Toyota. Hasil dari kerja sama tersebut ialah terciptanya tipe mobil Kijang yang merupakan singkatan dari Kerja sama Indonesia-Jepang.

Tentu saja hal di atas menjadi fakta bahwasanya pemerintah masa orde baru telah berhasil membangun kembali perekonomian Indonesia, bahkan hingga mendapatkan julukan sebagai Macan Asia. Dari beberapa pencapaian tersebut adapun gerakan deregulasi yang berkaitan dengan investasi asing mengenai kebebasan dan keringanan ekspor dan juga perizinan bagi pendirian bank swasta serta pembukaan cabang bagi bank yang sudah ada. Meskipun deregulasi ini membawa dampak positif bagi perekonomian akan tetapi reformasi

finansial tersebut pula yang akan menjadi masalah inti dari terjadinya krisis ekonomi Indonesia.

Masa orde baru memang memiliki perkembangan ekonomi yang cepat dan pengurangan angka kemiskinan yang signifikan, akan tetapi pemerintahan pada saat itu ialah sebuah bentuk rezim otoriter yang membatasi partisipasi masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan. Akibat daripada hal tersebut akhirnya mengundang munculnya gerakan pemberontakan dari berbagai kalangan yang menyadari adanya kejanggalan dalam kinerja pemerintahan.

Sayangnya aspirasi dan kritiknya terhadap pemerintah tersebut tidak didengarkan dan bahkan hak menyampaikan aspirasi tersebut seolah direnggut dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia. Seiring dengan konflik politik dan sosial yang berkejolak di dalam negeri, pada tahun 1997 wilayah Asia mengalami krisis keuangan atau finansial dan Indonesia juga turut terkena dampak tersebut.

Pada krisis tersebut menjadikan nilai mata uang rupiah mengalami inflasi sekitar 70% yang semula Rp.4000 per dolar menjadi Rp.16000 per dolar, akibat daripada hal tersebut nilai bahan baku menjadi terlampaui mahal dan perusahaan-perusahaan yang memiliki pinjaman dolar mengalami kebangkrutan dan beberapa perusahaan yang berusaha bertahan melakukan PHK massal yang turut meningkatkan jumlah pengangguran.

Dari peristiwa ini pula dimulainya yang dinamakan krisis moneter dan menjadi titik balik pemerintahan orde baru yang meluluh lantahkan segala pencapaian ekonomi sebelumnya. Pada masa itu angka jumlah pengangguran berada dalam kisaran 14 juta orang hingga melonjak ke angka 20 juta orang yang berarti nilainya 50% dari total angkatan kerja.

Adapun yang menjadi penyebab inti daripada penderitaan perekonomian saat itu ialah sistem finansial yang telah kehilangan kontrol akibat daripada tidak bijaknya pemerintah dalam mengadakan peraturan perbankan sehingga mengalami kesulitan dalam menangani sistem aliran dana di sektor perbankan Indonesia. Permasalahan perbankan ini akhirnya mengungkap fakta bahwa akibat kerangka hukum yang lemah menjadikan regulasi perbankan Indonesia nyatanya dipenuhi oleh aliran dana ilegal. Segala permasalahan perbankan dan perusahaan ini tidak dapat menemukan titik solusinya sehingga terjadilah kasus gagal bayar.

Dalam penderitaan inilah rakyat menemukan secercah harapan akan reformasi Indonesia, momen ini dimanfaatkan oleh rakyat dan mahasiswa untuk melakukan perlawanan terhadap rezim otoriter. Ada banyak terjadi kerusuhan dan penjarahan, permasalahan mengenai etnis Tionghoa dan pribumi menjadi salah satu isu utama. Skeptis di kalangan masyarakat perihal etnis Tionghoa terjadi akibat daripada stigma bahwa etnis Tionghoa

memiliki keuntungan lebih dari pemerintah akibat daripada koneksi penguasa elit berketurunan tionghoa.

Dengan segala macam kekisruhan yang terjadi, pada akhirnya Sang Presiden yang telah 30 tahun berkuasa memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Soeharto secara resmi lengser dan digantikan oleh B.J Habibie sebagai Presiden selanjutnya. Lengsernya Presiden Soeharto menandai berakhirnya era orde baru dan membawa harapan angin segar bagi era reformasi.

Indonesia pasca orde baru memang terus melakukan banyak peningkatan dan perbaruan dalam merancang formula terbaik untuk sistem perekonomiannya agar dapat membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Setelah melewati berbagai masa kepemimpinan dan peristiwa jatuh bangun, ada tolak ukur yang nampaknya menarik untuk dibahas terkait dunia digital saat ini yang bersifat serba instan, cepat dan tanpa batas dapat Indonesia hadapi dengan salah satu tolak ukurnya ialah dapat menjaga dan mengembangkan sistem ekonomi dengan signifikan seperti yang terjadi pada masa orde baru dan menghindari terulangnya peristiwa pahit pada masa itu.

Seperti yang kita ketahui pada era digital saat ini orang-orang lebih banyak mengandalkan perangkat elektronik dan akses internet dalam mempermudah aktivitasnya. Hal ini tentu menjadi media serta ruang bermain baru bagi dunia perekonomian. Ada banyak program yang menjadi fokus pada masa orde baru dapat dimaksimalkan dan diperbarui dengan dukungan teknologi di era digital. Seumpama mengenai pembangunan nasional, pertanian, perdagangan dan manufaktur.

Siasat pemerintah orde baru dalam memperkuat perekonomian negara melewati sektor-sektor tersebut nyatanya menjadi salah satu kiat sukses perkembangan ekonomi, maka apabila siasat tersebut direformulasi dengan tambahan nilai teknologi dan digitalisasi, bukan tidak mungkin akan memberikan hasil yang lebih maksimal dan relevan untuk keadaan Indonesia saat ini.

Maka dikenalkanlah sebuah program baru yang dinamakan Ekonomi Digital, dimana secara garis besar ekonomi digital memanfaatkan kegunaan teknologi sebagai alat pendukung perkembangan ekonomi, dengan hadirnya dunia digital maka dapat memperluas prospek ekonomi dan meningkatkan interaksi global. Kita sadari bahwasanya dunia digital ini membawa banyak individu atau kelompok pada keharusan untuk menggunakan alat elektronik yang memiliki fungsi lebih mutakhir dan kinerja yang lebih efisien, maka dalam mengembangkan sektor pembangunan nasional perlu memaksimalkan mengenai

pembangunan aksesibilitas infrastruktur digital yang tentunya disertai oleh keamanan siber bagi penggunanya.

Di Indonesia sendiri Undang-undang mengenai keamanan siber telah ditetapkan dalam Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam memahami urgensi pembangunan infrastruktur bagi akses digital kita dapat mempertimbangkan perihal begitu banyaknya aktivitas pada saat ini yang mengandalkan akses digital, maka penting bagi pemerintah untuk memperhatikan pembangunan atau ketersediaan menara telekomunikasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia.

Mengutip data pada tahun 2022 yang dilampirkan oleh *Digital Transformation Indonesia (DTI)* dalam membandingkan rasio jumlah penduduk per menara (*population/tower*) dan luas area per menara (*km²/tower*) di Indonesia. Tercatat bahwa setiap menara di yang ada melayani 2.400 orang dengan jangkauan cakupan sebesar 16,4 km², data ini menyatakan bahwa kondisi Indonesia dalam menyediakan fasilitas digital masih di bawah negara Asia yang lainnya (Budhiani, 2024). Maka berdasarkan data tersebut perlu dilakukan lebih banyak pembangunan akses telekomunikasi yang dapat lebih banyak menjangkau pengguna dan wilayah, agar dapat mendukung aktivitas digital yang menjadi salah satu ruang lingkup yang dapat memaksimalkan perkembangan ekonomi.

Dengan adanya akses layak untuk menjangkau dunia digital maka secara tidak langsung dapat meningkatkan produktivitas kegiatan ekonomi yang ada di wilayahnya masing-masing, bahkan hal ini memungkinkan bagi wilayah itu sendiri dapat meningkatkan pemasukan dan membangun wilayahnya. Lewat aksesibilitas memadai terhadap dunia digital yang layak maka akan mudah dalam meningkatkan aktivitas pembangunan ekonomi yang relevan dengan dunia global. Menjadikan daya saing Indonesia lebih unggul di panggung dunia. Apabila ranah digital sudah dapat diakses dengan baik oleh seluruh masyarakat Indonesia bukan tidak mungkin bahwa produk domestik dapat meningkatkan kualitas agar dapat turut dipasarkan di pasar dunia. Seperti misalkan dari sektor pertanian, Indonesia banyak mendapatkan pemasukan dari hasil ekspor Kopi, Kakao, Minyak Sawit, dan Karet akan tetapi dari setiap produk tersebut yang selalu menjadi masalah inti terhambatnya perkembangan distribusi ialah kurangnya pemaksimalan pengelolaan produk di tangan petani karena para petani tidak memiliki akses yang memadai perihal teknologi dan dapat membantu meningkatkan produktivitas atau kualitas dari produk mereka.

Berkaca pada keberhasilan swasembada beras, seharusnya Indonesia saat ini yang telah menemukan lebih banyak potensi baru dari sumber daya alam dan sektor pertanian, mestinya harus bisa mengembangkan pengelolaan pertanian lewat bantuan teknologi agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

Tidak hanya mengenai sektor pertanian tapi juga dari sektor perikanan, tekstil, pertambangan, manufaktur, dan yang lainnya harus bisa memanfaatkan kehadiran teknologi dan dunia digital sebagai alat yang maksimal. Diyakini bahwa apabila teknologi dan dunia digital dapat mudah diakses maka laju perkembangan ekonomi Indonesia akan pesat meningkat. Akan ada banyak investor yang menjadi perbekalan dalam membangun bangsa. Akan ada banyak permasalahan-permasalahan yang teratasi apabila pemerataan pembangunan dalam ranah peningkatan infrastruktur digital dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pengembangan ekonomi digital bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sebagai instrumen strategis dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam meraih keuntungan dari tujuan tersebut maka dirancanglah sebuah strategi yang dinamakan Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2023-2030. Strategi tersebut ialah memiliki 6 Pilar Utama, yaitu:

- a. Infrastruktur
- b. Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Iklim Bisnis dan Keamanan Siber
- d. Penelitian, Inovasi & Pengembangan Bisnis
- e. Pendanaan & Investasi
- f. Kebijakan/Regulasi.

(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023)

Dengan pilar yang disebutkan tersebut dapat dipenuhi lalu pemerintah dan rakyat sanggup untuk saling bersinergi maka dapat memungkinkan bahwa gelar Indonesia sebagai ‘Macan Asia’ dapat kembali diraih atau bahkan lebih dari itu, Indonesia akan dapat memasuki era sebagai salah satu negara maju. Indonesia bukan tidak mengenal teknologi akan tetapi hanya tidak melakukan pemanfaatan teknologi dan ruang digital secara rata dan maksimal. Beberapa kegiatan ekonomi dengan menggunakan pemanfaatan teknologi telah dilakukan dengan sebagai contoh telah hadirnya toko elektronik seperti Tokopedia, Bukalapak dan Shopee. Toko digital buatan Indonesia tersebut telah sukses menyediakan lapak usaha berbasis *online* bagi siapapun yang dapat menjangkau konsumen di seluruh Indonesia. Mereka menyediakan berbagai produk dari mulai makanan, pakaian, alat

elektronik, dan kebutuhan lainnya. Pasarannya bahkan telah mencapai luar negeri. Adapun dalam bidang transportasi yaitu Gojek, *Indrive* dan Grab, yang bermitra dengan individu setempat untuk menyediakan akses layanan dalam mencari penumpang yang membutuhkan akses transportasi pribadi seperti sepeda motor ataupun mobil. Bahkan tidak jarang aplikasi ini digunakan sebagai alat dalam mengirimkan barang. Hadirnya berbagai macam aplikasi ini tidak berperan meningkatkan nilai perdagangan dan perekonomian akan tetapi juga turut membantu menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang ada di Indonesia.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masa lalu, khususnya sejarah perekonomian Indonesia, memiliki keterkaitan erat dengan kondisi kehidupan saat ini. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia mampu bangkit dari keterpurukan ekonomi, seperti pada masa hiperinflasi, melalui penerapan kebijakan ekonomi yang tepat dan program-program yang relevan. Strategi ini menjadi pelajaran penting bahwa pemahaman terhadap keadaan dan kebutuhan negara dapat menjadi kunci keberhasilan. Sejak era Orde Baru, Indonesia telah mengenali dan memanfaatkan potensi sumber daya alamnya. Hingga saat ini, potensi tersebut tidak hanya dipertahankan tetapi juga diperluas untuk mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam era digital, ruang digital yang tersedia kini menjadi peluang baru untuk meningkatkan perekonomian. *Platform* digital ini membantu mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan, dengan membuka ruang usaha baru di berbagai bidang.

Namun, penelitian ini juga menekankan bahwa potensi yang besar tidak akan memberikan hasil maksimal apabila dikelola dengan cara yang tidak tepat. Pengelolaan sumber daya membutuhkan pengetahuan dan keterampilan yang memadai, termasuk akses terhadap teknologi yang relevan. Selain itu, keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya juga sangat bergantung pada integritas pengelolanya. Fasilitas dan jabatan akan kehilangan makna jika dijalankan tanpa kejujuran dan hanya berorientasi pada keuntungan pribadi atau kelompok kecil. Dalam hal ini, kesewenang-wenangan hanya akan membawa kehancuran. Penelitian ini menggunakan sistem ekonomi masa Orde Baru sebagai acuan untuk memahami perkembangan ekonomi di era digital. Namun, masih terdapat kekurangan dan ketidaklengkapan dalam pengelolaan data dan informasi. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperkaya pembahasan dan memastikan akurasi data. Penelitian yang lebih mendalam diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih rinci tentang kaitan sejarah ekonomi dengan era digital. Penelitian lanjutan juga dapat membantu memperkuat argumen serta memberikan solusi yang lebih aplikatif untuk mendukung

pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini penting agar hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan kebijakan publik.

DAFTAR REFERENSI

- Adryamarthanino, V., & Nailurfar, N. N. (2021, Oktober 05). Utang luar negeri masa Orde Baru. *Kompas.com*. Retrieved from <https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/05/090000779/utang-luar-negeri-masa-orde-baru>
- Budhiani, O. (2024, Januari 24). Melonjaknya permintaan menara telekomunikasi. *Digital Transformation Indonesia*. Retrieved from <https://digitaltransformation.co.id/pertumbuhan-menara-telekomunikasi-di-indonesia-mengungkap-permintaan-yang-melonjak/>
- Hamid, E. S. (2004). *Sistem ekonomi, utang luar negeri, dan politik-ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.
- Hudiyanto. (2004). *Ke luar dari Ayun Pendulum Kapitalisme-Sosialisme*. Yogyakarta: UMY Press.
- Inanna, & Nurjannah. (2023). *Perekonomian Indonesia*. Makassar: Tahta Media Group.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2023). *Buku Putih Strategi Nasional: Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030*. Jakarta: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (2024, Agustus 05). *Siaran pers. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia*. Retrieved from <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5908/indonesia-berhasil-catat-pertumbuhan-triwulan-ii-2024-mencapai-505>
- Linda, J. (2022). *Analisis pengaruh PDRB perkapita, jumlah penduduk miskin, pendidikan, dan investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi (Thesis, p. 3)*. Jambi: Repository Universitas Jambi.
- Maulidina, D. N., Kurniawan, M. R., & Yasin, M. (2023). Faktor-faktor krisis dan dampak krisis yang pernah terjadi. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 181-193.
- Pradhan, R. P., Arvin, M. B., Nair, M., Bennett, S. E., & Bahmani, S. (2019). Short-term and long-term dynamics of venture capital and economic growth in a digital economy: A study of European countries. *Technology in Society*, 57, 125-134.
- Priyono, & Ismail, Z. (2012). *Teori ekonomi*. Surabaya: Dharma Ilmu.
- Suprayogi, M. A. (2023). Analisis data panel dinamis pertumbuhan ekonomi di Indonesia dengan metode FD-GMM dan SYS-GMM. *Jurnal Bayesian: Jurnal Ilmiah Statistika dan Ekonometrika*, 1.